



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2019**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Yogyakarta.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2019 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor 71B/SK-RENJA/VI/2018 tentang Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2019, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah-nya. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- 8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- 9) Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
- 10) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019.
- 11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019;

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I    PENDAHULUAN

BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

BAB IV    PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur ;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan jenis belanja langsung yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan perencanaan.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 605.975.292,- dari target Rp. 673.424.060,- (89,98%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 56,30% dari target 52,36% (107,52%)

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 135.399.371,- dari target Rp.164.373.600,- (82,37%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 35,33% dari target 35,33% (100%)

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 1.342.400,- dari target Rp.1.951.600,- (68,78%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 12,31% dari target 12,31% (100%)

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kemajuan fisik dan keuangan sampai dengan triwulan II masih 0% yang akan dilaksanakan pada Triwulan III.

**5. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 338.736.520,- dari target Rp. 432.578.720,- (78,31%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 46,38% dari target 46,38% (100%)

**6. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik**

Pelaksanaan program ini didukung dengan (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 399.408.200,- dari target Rp. 399.891.300,- (99,88%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 50,18% dari target 50,18% (100%)

**7. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial**

Pelaksanaan program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 189.474.500,- dari target Rp.203.175.500,- (93,26%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 50,69% dari target 50,69% (100%)

**8. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 381.429.580,- dari target Rp.418.976.180,- (91,04%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 51,49% dari target 39,20% (131,35%)

**9. Program Penelitian dan Pengembangan**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian, Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis, dan Kegiatan Inovasi Daerah.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 342.745.940,- dari target Rp. 1.118.851.300,- (30,63%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 45,28% dari target 42,85% (105,67%)

Adapun evaluasi program dan kegiatan triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :



Matriks ada di file excel



### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Alokasi anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertambah dari Rp. 1.181.035.840,- menjadi Rp. 1.421.903.000,-. atau bertambah sebesar 20,39 %. Kenaikan anggaran ini dikarenakan adanya penambahan volume perjalanan dinas keluar daerah, pemeliharaan kantor dan penambahan belanja peralatan dan perlengkapan kantor.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019  
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,181,035,840</b>	<b>1,421,903,000</b>	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum koordinasi	66 kali	66 kali	334,775,000	348,375,000	adanya penambahan volume koordinasi keluar daerah sebanyak 2 kali
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 laporan	42 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai yang tersedia	1.600 lembar	1.600 lembar	846,260,840	1,073,528,000	output komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dari 4 jenis menjadi 5 jenis untuk penambahan almari permanen lantai III dan vacuum cleaner
		Jasa pengiriman/paket	20 kali	20 kali			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa penggandaan	250.000 lembar	250.000 lembar			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	5 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>457,540,000</b>	<b>448,410,000</b>	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	1 unit	270,000,000	300,000,000	Penambahan pemeliharaan cat interior gedung
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	27 unit	27 unit	187,540,000	148,410,000	Efisiensi belanja suku cadang dan BBM
		STNK kendaraan yang terbayar	27 unit	27 unit			
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43,650,000</b>	<b>15,990,000</b>	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	1 kali	1 kali	43,650,000	15,990,000	Efisiensi pengiriman diklat formal
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15,850,000</b>	<b>11,200,000</b>	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	15,850,000	11,200,000	Efisiensi belanja jamuan makan minum rapat koordinasi
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
<b>5</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi</b>	<b>91,40%</b>	<b>91,40%</b>	<b>867,756,480</b>	<b>784,573,000</b>	
5.1	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen	60,128,620	59,379,000	Efisiensi honorarium non PNS

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	Dokumen perencanaan sektor perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen	248,013,620	252,014,000	Penambahan volume jamuan rapat koordinasi untuk monev kelurahan budaya
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen perencanaan sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen	559,614,240	473,181,000	Efisiensi jamuan, narasumber, transport dan tenaga ahli
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah	2 dokumen	2 dokumen			
<b>6</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik</b>	<b>91,40%</b>	<b>91,40%</b>	<b>790,734,860</b>	<b>612,543,000</b>	
6.1	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen perencanaan sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen	84,473,620	84,474,000	
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
6.2	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Dokumen perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen	531,082,620	372,421,000	Efisiensi belanja modal kajian energi karena kewenangan energi ada di Pemda DIY

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
6.3	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	175,178,620	155,649,000	Efisiensi honorarium, penggandaan dam makan minum
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
<b>7</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial</b>	<b>91,40%</b>	<b>91,40%</b>	<b>524,746,100</b>	<b>494,117,000</b>	
7.1	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan	Dokumen perencanaan sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	48,733,620	48,204,000	Efisiensi untuk Penyesuaian SHBJ jamuan makan dan narasumber
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
7.2	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen	427,368,860	400,694,000	Efisiensi Honorarium Non PNS dan Penyesuaian SHBJ jamuan makan dan narasumber
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	5 dokumen	5 dokumen			
7.3	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Dokumen perencanaan sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen	48,643,620	45,219,000	Efisiensi jamuan rapat koordinasi RAD PPK karena integrasi KPK sehingga kegiatan dipindah di inspektorat
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur	2 dokumen	2 dokumen			
<b>8</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91,40%</b>	<b>91,40%</b>	<b>878,030,720</b>	<b>723,206,000</b>	
8.1	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Dokumen RKPDP Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	436,087,240	415,388,000	Efisiensi narasumber, makan minum dan penyesuaian nilai kontrak jasa EO
		Dokumen RKPDP Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Renja OPD	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY	1 dokumen	1 dokumen			
8.2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi RPJMD	2 dokumen	2 dokumen	240,862,240	124,738,000	Efisiensi jasa EO dan FGD
		Dokumen evaluasi RKPDP	6 dokumen	6 dokumen			
		Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen			
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SDGs	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian 12 Pokok Pikiran Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK, dan Dana Keistimewaan	1 dokumen	1 dokumen			
8.3	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Metadata sektoral tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	201,081,240	183,082,000	Efisiensi honorarium tenaga ahli analisa data
		Analisa Data tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Data Series SIPD Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan pemetaan data pembangunan berbasis GIS	1 laporan	1 laporan			
		Pengembangan Data dan Informasi	1 dokumen	1 dokumen			
<b>9</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>2,191,648,860</b>	<b>1,860,427,000</b>	
9.1	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Penelitian	6 dokumen	6 dokumen	794,040,620	559,041,000	Efisiensi untuk penyesuaian nilai kontrak swakelola
		Buku Jurnal Jarlit 2019	1 jenis buku	1 jenis buku			
		Dokumen Penelitian Strategis	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Kemitraan Perguruan Tinggi	1 laporan	1 laporan			
9.2	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	911,980,620	815,759,000	Efisiensi Narasumber, jamuan rapat, penggandaan, transport dan moderator
		Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengembangan Riverside Kawasan Kota Baru	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
9.3	Pemantapan Inovasi Daerah	Anugerah Inovasi dan Penelitian	2 jenis	2 jenis	485,627,620	485,628,000	
		Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Forum Inovasi Daerah	1 laporan	1 laporan			
<b>Total</b>					<b>6,950,992,860</b>	<b>6,372,367,000</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2019. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2019

KEPALA BAPPEDA

Drs. HERI KARYAWAN  
19591114 198903 1 004